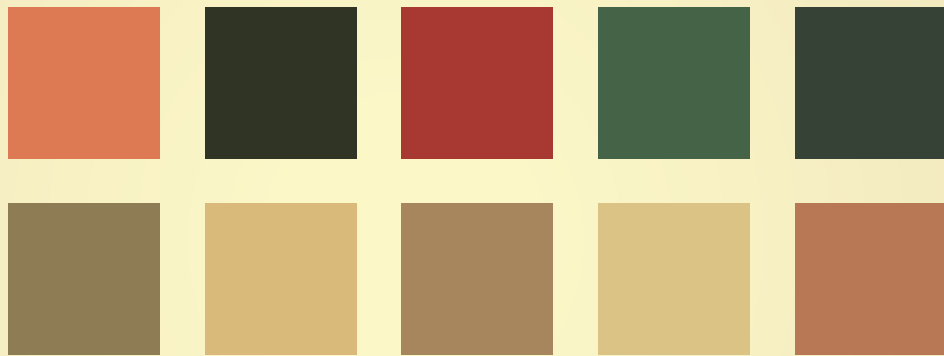


Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama:
Pengutamaan Pendekatan Kesejahteraan dan Sosial
Budaya dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan

Politik

- Batalnya Kenaikan Harga BBM Subsidi ▪
- Prospek Pemilu 2014 dan Fenomena Partai Nasdem ▪

Sosial

- Asuransi TKI ▪
- Ujian Nasional (Lagi) ▪
- Ujung Tombak Ketahanan Pangan ▪

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Pengutamaan Pendekatan Kesejahteraan dan Sosial Budaya dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan	2
POLITIK	
Batalnya Kenaikan Harga BBM Subsidi.....	8
Prospek Pemilu 2014 dan Fenomena Partai Nasdem.....	11
SOSIAL	
Asuransi TKI	14
Ujian Nasional (Lagi)	17
Ujung Tombak Ketahanan Pangan	20
PROFILE INSTITUSI.....	23
PROGRAM RISET DAN PELATIHAN	24
ADVERTORIAL INDONESIA 2010	26

Tim Penulis :

Anies Baswedan (**Direktur Eksekutif & Riset**), Endang Srihadi (**Koordinator**),
Antonius Wiwan Koban, Benni Inayatullah, Hanta Yuda AR., Lola Amelia.

Editor : Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Kondisi geografis Indonesia dengan panjang perbatasan darat 3.032 kilometer dan 90 pulau kecil terluar memiliki perbatasan darat dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini dan perbatasan laut dengan Malaysia, Thailand, Singapura, India, Filipina, Timor Leste, Republik Palau, Papua Nugini, dan Australia. Hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi Indonesia, terutama ketika berbicara tentang isu-isu seperti pemerataan pembangunan, kedaulatan, kesejahteraan, separatisme, terorisme, penyelundupan manusia, dan sebagainya.

Terkait dengan masalah dan penanganan daerah perbatasan, dapat dipetakan sejumlah isu besar diantaranya: (1) Minimnya kehadiran Negara; (2) Ketidakpuasan rakyat di kawasan perbatasan; (3) Paradoksial pendekatan keamanan; (4) Realitas sosial budaya dan dinamisasi isu perbatasan. Update Indonesia kali ini mengangkat tema utama tentang Pengutamaan Pendekatan Kesejahteraan dan Sosial Budaya dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan.

Update Indonesia kali ini juga mengangkat tema-tema penting di bidang hukum, politik dan sosial. Bidang politik mengangkat tema mengenai Batalnya Kenaikan Harga BBM Subsidi dan tema tentang Prospek Pemilu 2014 dan Fenomena Partai Nasdem. Bidang sosial mengangkat tiga tema berbeda yakni: (1) Asuransi TKI; (2) Ujian Nasional; dan mengenai (3) Ujung Tombak Ketahanan Pangan

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi dan think tank internasional dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya di Indonesia.

Selamat membaca.

Pengutamaan Pendekatan Kesejahteraan dan Sosial Budaya dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan

Kondisi geografis Indonesia dengan panjang perbatasan darat 3.032 kilometer dan 90 pulau kecil terluar memiliki perbatasan darat dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini dan perbatasan laut dengan Malaysia, Thailand, Singapura, India, Filipina, Timor Leste, Republik Palau, Papua Nugini, dan Australia. Hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi Indonesia, terutama ketika berbicara tentang isu-isu seperti pemerataan pembangunan, kedaulatan, kesejahteraan, separatisme, terorisme, penyelundupan manusia, dan sebagainya.

Pemetaan isu dan persoalan di kawasan perbatasan

Terkait dengan masalah dan penanganan daerah perbatasan, dapat dipetakan sejumlah isu besar diantaranya:

1. Minimnya kehadiran negara

Merujuk pada teori klasik pembuatan batas, ada empat tahap yang harus dilakukan yaitu alokasi, delimitasi, demarkasi, dan administrasi. Ini dikemukakan oleh Stephen B. Jones pada tahun 1945 dan dipercaya masih benar adanya sampai saat ini (www.borderstudies.info). Alokasi adalah proses penentuan secara umum kawasan yang menjadi milik satu pihak dan pihak lain, tanpa melakukan pembagian secara akurat/teliti. Proses ini bersifat politis.

Delimitasi adalah penetapan garis batas secara teliti di atas peta, berdasarkan proses alokasi sebelumnya. Demarkasi adalah proses penegasan titik dan garis batas dengan pemasangan pilar/patok di lapangan berdasarkan delimitasi sebelumnya. Tahap terakhir adalah administrasi yang berarti adalah Pengelolaan perbatasan, termasuk

pemeliharaan titik/garis. Hal utama dari tahap ini adalah memastikan dan menjamin kehidupan penduduk yang hidupnya bergantung pada kawasan perbatasan itu.

Dalam hal batas Indonesia-Malaysia di Kalimantan, proses alokasi dan delimitasi sesungguhnya sudah final karena sudah dilakukan oleh Inggris dan Belanda. Yang belum diselesaikan adalah demarkasi yang akibatnya juga menghambat proses administrasi atau pengelolaan.

Dalam banyak kasus di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, terutama Malaysia, tahap terakhir dari fase penanganan perbatasan, yaitu fase administrasi belum diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia. Hal mendasar dari fase administrasi adalah memastikan dan menjamin kehidupan penduduk yang hidupnya tergantung pada kawasan perbatasan tersebut. Minim sekali infrastruktur mendasar yang disediakan oleh Pemerintah RI terutama dalam kebutuhan kesehatan, pendidikan, komunikasi, ekonomi dan perhubungan perintis.

Di sisi lain, negara tetangga, terutama Malaysia relatif telah lebih maju dalam fase administrasi ini. Dampaknya, tidak sedikit rakyat Indonesia yang menyeberang untuk mengakses fasilitas ekonomi dan sosial kesehatan yang dimiliki oleh Malaysia. Bahkan dalam persoalan perbatasan dengan Timor Leste, kehadiran negara disimbolkan dengan sebatas kehadiran aparat TNI, yang sesungguhnya hanya bertugas sebagai penjaga keamanan di perbatasan. Tetapi dalam prakteknya, karena minimnya kehadiran fungsi-fungsi pemerintahan di wilayah tersebut maka aparat TNI juga merangkap sebagai tenaga guru, kesehatan masyarakat, hakim dan lain-lain.

2. Ketidakpuasan rakyat di kawasan perbatasan

Kondisi terkini menunjukkan bahwa problematika masyarakat di wilayah perbatasan masih didominasi oleh minimnya infrastruktur dan rendahnya tingkat ekonomi warga. Selain itu, masyarakat perbatasan juga menghadapi rendahnya suplai barang kebutuhan pokok buatan Indonesia dan relatif lebih mahal dari barang buatan negara

tetangga. Contohnya di sebagian wilayah perbatasan di Kalimantan, masyarakat Indonesia mau tidak mau harus membeli barang-barang Malaysia dan menggunakan gabungan rupiah-ringgit sebagai alat pembayaran.

Karena kawasan perbatasan tidak tertangani dengan baik, tidak heran jika beberapa Warga Negara Indonesia memilih untuk berpindah kewarganegaraan seperti yang terjadi di Desa Suruh Tembawang, Entikong pada beberapa tahun terakhir (LIPI, 2011). Hal ini menunjukkan terakumulasinya kekecewaan terhadap Pemerintah karena minimnya kehadiran pembangunan di wilayah mereka.

3. Paradoksial pendekatan keamanan

Realitas selama ini menunjukkan bahwa isu perbatasan masih cenderung ditangani dengan pendekatan keamanan berbasis teritorial. Aparat TNI sangat mendominasi representasi negara di wilayah perbatasan. Perbatasan masih dilihat dalam kaca mata resiko keamanan negara, sehingga harus mengutamakan pendekatan keamanan.

Jika memang Pemerintah mengedepankan pendekatan keamanan teritorial, tetapi dalam banyak kasus wilayah perbatasan Indonesia masih sering dimanfaatkan untuk tindak kejahatan penyelundupan narkoba, illegal logging dan pencurian ikan di wilayah laut Indonesia.

Kondisi ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa pendekatan keamanan belum mencapai hasil yang diinginkan. Ke depan, pendekatan keamanan memang tetap diperlukan selain dengan pengutamaan pendekatan kesejahteraan. Untuk itu, masuk akal bila Pemerintah memperkuat sistem pertahanan keamanan di wilayah perbatasan melalui modernisasi infrastruktur dan merelokasi sejumlah markas satuan bala bantuan pusat.

4. Realitas sosial budaya dan dinamisasi isu perbatasan

Aparat negara masih terdominasi untuk mengawal perbatasan negara berdasarkan pengetahuan kartografis. Realitas kartografis adalah pengetahuan yang terbentuk karena kekuatan visual sebuah

peta. Perbatasan lahir sebagai garis-garis imajiner di atas peta yang diproyeksikan di atas morfologi alam, yang dalam kehidupan nyata sebenarnya tidak dapat ditaklukkan dengan mudah (Kompas, 18 Oktober 2011).

Negara tidak menyiapkan aparatnya saat berhadapan dengan irregularitas alam di perbatasan, batas-batas sosial yang ternyata cair, logika dan praksis ruang masyarakat perbatasan yang lebih heterogen, maupun realitas mobilitas lintas-batas perbatasan yang lebih responsif dan fleksibel terhadap interkoneksi antar negara.

Berbeda dengan pusat negara, wilayah perbatasan menjadi lokasi dimana persoalan nasionalisme jadi hitam-putih. Pemakaian uang ringgit di perbatasan dilihat sebagai tindakan a-nasionalistis. Isu pergeseran patok-patok perbatasan, hal yang sebenarnya abstrak bagi sebagian besar publik yang jauh dari perbatasan, mampu membangkitkan emosi nasionalisme yang militan.

Dalam logika kartografis, orang Malaysia berbeda dengan orang Indonesia, terlepas dari fakta banyak komunitas di perbatasan masih berkeluarga atau beretnis sama dengan mereka yang di Malaysia. Sesuatu yang berbeda selalu dilihat sebagai ancaman dan nasionalisme tidak mengenal ambivalensi.

Sementara realitas ekologi-sosial-budaya yang dinamis dan cair dilihat dari sudut pandang negara seolah-olah hadir tanpa keteraturan. Berbagai patok perbatasan semen yang dibuat Pemerintah selama 1970-an telah hilang tak berbekas karena 'dikalahkan' oleh alam, seperti tertutup semak belukar, terkubur humus, atau retak karena desakan akar pohon.

Komunitas-komunitas masyarakat di pedalaman telah ratusan tahun beradaptasi dengan kondisi ekologi setempat. Pola mobilitas seperti perpindahan kampung, siklus perladangan gilir balik maupun pemanfaatan hasil hutan, budaya merantau untuk menukar hasil hutan dengan komoditas pantai, dan orientasi sosial berbasis sungai adalah hasil adaptasi banyak kelompok etnis Dayak yang sering kali

dipandang negatif oleh negara.

Terdapat banyak bukti bahwa orientasi ruang masyarakat perbatasan ke luar NKRI bukanlah karena 'lunturnya rasa nasionalisme' atau 'daya tarik negara tetangga', tetapi justru terbentuk karena formasi alam yang menentukan keberlangsungan hidup sebuah komunitas. Mobilitas manusia sering terbentuk karena rantai komoditas yang selalu mencari jalur terpendek dari daerah suplai ke pasar, terlepas apakah formasi alam ini 'patuh' pada batas teritori negara.

Pemahaman ruang berbasis kartografis menyulitkan negara dalam melihat persoalan perbatasan dengan jernih. Sebuah ruang pemahaman yang menyulitkan negara dalam memahami kompleksitas perbatasan yang memiliki logika ruangnya sendiri. Menjadi ironi ketika Belanda dan Inggris, sebagai pihak yang 'mengarang' perbatasan Indonesia-Malaysia, tidak memperlakukan perbatasan secara sakral seperti Indonesia-Malaysia yang mewarisinya.

Pengutamaan pendekatan kesejahteraan dan sosial budaya.

Negara perlu memikirkan ulang definisi maupun metodologi pendekatan yang senantiasa melihat perbatasan secara hitam-putih, absolut, dan sebagai potensi ancaman keamanan. Pemahaman tentang dinamisme wilayah perbatasan akan jadi dasar yang kuat bagi formulasi kebijakan perbatasan yang manusiawi, sesuai kebutuhan masyarakat perbatasan.

Wilayah perbatasan hendaknya tak lagi diperlakukan sebagai ruang demarkatif, tetapi harus ruang antarmuka sosial di mana dinamisasi masyarakat perbatasan hendaknya dilihat sebagai kekuatan untuk membangun halaman muka NKRI yang sejahtera dan sesuai perkembangan jaman. Ini adalah 'benteng' nasionalisme yang lebih substantif.

Pendekatan kesejahteraan melalui pembangunan menjadi krusial untuk menunjukkan kedaulatan dan kepemilikan, serta kepedulian Pemerintah atas wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar In-

donesia, juga penduduk yang berdomisili di sana. Pendekatan kesejahteraan juga akan meningkatkan sense of belonging penduduk di wilayah perbatasan karena mereka juga merasa diperhatikan oleh Pemerintah.

Hal tersebut juga yang membuat mereka melihat Pemerintah dan NKRI menjadi lebih relevan dengan mereka. Lebih jauh, pengelolaan di wilayah perbatasan juga tidak hanya fokus pada daerah perbatasan yang memiliki kekayaan alam, namun juga wilayah perbatasan seperti pulau-pulau terluar yang juga menjadi pintu gerbang dengan negara-negara lain.

Optimalisasi pendekatan kesejahteraan di wilayah perbatasan juga belum cukup, tanpa diimbangi diplomasi perbatasan yang intensif, strategis, dan tegas oleh Pemerintah dan segenap jajarannya. Dalam hal ini, Pemerintah harus memiliki posisi yang jelas terkait isu-isu wilayah perbatasan. Pemerintah harus mempunyai sikap yang tegas dan berani menyangkut isu kedaulatan, terlepas dari upaya diplomatis untuk menjaga hubungan baik (yang sifatnya timbal balik) dengan negara-negara tetangga yang berhadapan langsung dengan wilayah kedaulatan Indonesia.

Pendekatan kesejahteraan melalui pembangunan menjadi krusial untuk menunjukkan kedaulatan dan kepemilikan, serta kepedulian Pemerintah atas wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia, juga penduduk yang berdomisili di sana. Pendekatan kesejahteraan juga akan meningkatkan sense of belonging penduduk di wilayah perbatasan karena mereka juga merasa diperhatikan oleh Pemerintah.

- Endang Srihadi -

Batalnya Kenaikan Harga BBM Subsidi

Pada bulan Maret 2012 salah satu isu yang paling menyita perhatian masyarakat adalah rencana pemerintah Indonesia untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Kali ini, penolakan terhadap kenaikan harga BBM terlihat lebih kuat dari biasanya. Berbagai elemen masyarakat dan politisi menyuarakan ketidaksetujuan mereka dalam berbagai kesempatan. Politisi dari partai oposisi PDIP paling keras menentang kebijakan ini yang kemudian juga disertai oleh Partai Hanura dan Gerindra. Bahkan PKS yang merupakan mitra koalisi pemerintah turut menolak rencana kebijakan pemerintah ini.

Alasan Kenaikan

Pemerintah beralasan, perlunya menaikkan harga BBM adalah karena melambungnya harga minyak dunia dari semula asumsi APBN 2012 senilai USD 90 per-barrel hingga Maret telah mencapai rata-rata USD 105 per-barrel atau meningkat rata-rata 16,16 persen.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, peningkatan harga BBM di pasar dunia tersebut akan meningkatkan subsidi BBM yang berakibat kepada defisit APBN 2012. Asumsi harga minyak mentah Indonesia dalam APBN 2012 per-barrel USD 90 atau Rp 792.000 (kurs 1 USD = Rp 8.800) sehingga perkiraan harga minyak mentah Indonesia Rp 4.981 per liter.

Sementara biaya minyak mentah untuk dapat dijadikan bensin jenis premium dan untuk menyalurkannya sampai ke SPBU, diperlukan biaya yang dibutuhkan kira-kira Rp 3.019 per liter. Sehingga harga pokok dan biaya distribusi bensin premium adalah Rp 8.000 per liter. Dengan harga penjualan premium sebesar Rp 4.500 per liter maka negara memberikan subsidi sebesar Rp. 3.500/liter.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam rapat kerja pembahasan subsidi energi dengan Badan Anggaran DPR RI mengatakan kenaikan BBM juga disebabkan oleh melonjaknya konsumsi BBM bersubsidi. Dalam APBN 2012, volume konsumsi dipatok sebesar 40 juta kiloliter. Namun, data empirik penggunaan BBM sepanjang Januari hingga Februari 2012 mencapai 47,8 juta kiloliter atau terjadi lonjakan sebesar 18 persen.

Agus Martowardojo mengatakan lonjakan konsumsi ini disebabkan harga BBM bersubsidi di Indonesia yang sangat murah. Hal itu menyebabkan terjadinya penimbunan dan penyelundupan BBM. Murahnya harga BBM juga menyebabkan masyarakat yang seharusnya mampu beli BBM nonsubsidi turut menggunakannya karena selisih harga yang amat jauh, sehingga dengan begitu konsumsi terus melonjak

Untuk menekan lonjakan konsumsi BBM bersubsidi itulah perlunya dilakukan kenaikan harga. Jika hal ini tak dilakukan maka cadangan risiko volume konsumsi BBM bisa mencapai Rp 24,6 triliun. Jika angka ini ditambah subsidi BBM sebesar Rp 178 triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun, dan cadangan risiko energi Rp 23 triliun, maka total beban subsidi yang ditanggung negara mencapai Rp 290,6 triliun, atau sekitar 20 persen dari anggaran negara.

Hitung-hitungan pemerintah ini mendapatkan tentangan keras dari berbagai pihak, antara lain Kwik Kian Gie, mantan Menteri Koordinator Perekonomian yang memiliki hitung-hitungan sendiri yang hasilnya justru bila harga BBM tak dinaikkan, APBN masih memiliki sisa kurang lebih Rp 97,955 triliun sehingga kenaikan harga BBM subsidi sesungguhnya tidak diperlukan.

Paripurna DPR

Tentangan keras dari elemen masyarakat juga diwujudkan dalam demonstrasi yang dilakukan elemen masyarakat yang tergabung dalam berbagai organisasi seperti PMII, GMNI, PMKRI, HMI, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), PKNU, Partai Bulan Bintang (PBB), Komite Guru Bekasi, Repdem dan lainnya. Demonstrasi berlangsung sejak 28 Maret – 30 Maret 2012 dalam rangka mengawal sidang paripurna DPR RI yang akan memutuskan apakah akan menyetujui atau menolak usulan kenaikan BBM bersubsidi dari pemerintah.

Menjelang sidang paripurna 30 Maret 2012, partai-partai yang menyatakan mendukung kebijakan pemerintah tersebut adalah partai Demokrat, PKB, PPP, dan PAN sedangkan PDIP, PKS, Hanura

dan Gerindra menyatakan menolak kebijakan tersebut sementara Golkar menyatakan bahwa kenaikan harga BBM tidak tepat waktunya namun menyerahkan keputusan kepada pemerintah karena merupakan wewenang pemerintah.

Dalam persidangan, setelah melalui lobi-lobi antar Fraksi, DPR RI memutuskan melakukan voting dengan dua pilihan yakni: pertama, pasal 7 ayat 6 RAPBN-P tidak berubah yang artinya pemerintah diminta untuk tidak menaikkan harga BBM.

Pilihan kedua, tidak ada kenaikan BBM namun pemerintah diberikan ruang untuk menaikkan harga BBM melalui penambahan pasal 7 ayat 6A yang berbunyi “*Dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata sebesar 15 persen dalam 6 bulan terakhir dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukung.*”

Pilihan kedua akhirnya menjadi keputusan DPR karena mendapatkan suara terbanyak yaitu 356 suara dari Fraksi Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa serta Partai Golkar.

Sementara pilihan pertama hanya dipilih 82 suara yakni PKS dan Partai Gerindra dan dua politisi PKB yaitu Effendi Choirie dan Lily Wahid. Sedangkan Sebanyak 93 orang yaitu dari PDI Perjuangan dan Partai Hanura tidak memberikan pilihan karena melakukan walk out.

Dengan keputusan DPR tersebut, maka harga BBM subsidi tidak jadi naik pada 1 April 2012, kenaikan harga hanya bisa dilakukan bila harga minyak rata-rata 6 bulan kedepan mencapai 15 persen di atas asumsi ICP baru US\$ 105 per barel.

Apapun alasannya, menaikkan harga BBM akan berdampak langsung pada kemampuan daya beli masyarakat yang terus menurun. Dengan begitu, pemerintah sudah sepatutnya mempertimbangkan cara lain untuk menekan defisit APBN antara lain meningkatkan produksi minyak mentah yang terus menurun serta membenahi kebocoran anggaran pemerintah.

-Benni Inayatullah-

Prospek Pemilu 2014 dan Fenomena Partai Nasdem

Semakin tergerusnya tingkat kepercayaan publik dan memburuknya citra partai politik berdasarkan hasil survei berbagai lembaga independen menjadi peringatan serius bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Pasalnya institusi parpol di era reformasi memiliki kekuasaan politik amat kuat dan strategis: mendominasi seluruh proses sirkulasi elite kepemimpinan politik di eksekutif dan legislatif – presiden dan wakil presiden, anggota parlemen nasional dan daerah, serta kepala daerah – sekaligus menentukan seluruh komposisi kepemimpinan di lembaga yudikatif – hakim agung (MA) dan hakim konstitusi (MK) – serta keanggotaan komisi-komisi negara melalui proses politik di parlemen.

Namun, dukungan terhadap parpol di era demokratisasi yang belum genap berusia empat belas tahun ini mulai memberikan tanda-tanda mengalami titik kritis, karena citra dan tingkat kepuasan publik terhadap institusi utama demokrasi itu terus mengalami degradasi. Mengapa citra parpol kian menurun dan bagaimana dampaknya terhadap Pemilu 2014?

Problem parpol

Paling tidak ada tiga problem yang menyebabkan kian tergerusnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi parpol. Pertama, perilaku koruptif menghinggapi hampir semua parpol di parlemen yang berimbas pada penurunan kredibilitas institusi demokrasi itu. Potret perilaku koruptif hampir tak menyisakan satu pun partai di DPR yang tak terserempet kasus. Sebut saja misalnya, skandal Bank Century, mafia perpajakan, cek pelawat dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, impor daging, proyek pengadaan kereta api listrik bekas hibah dari Jepang, dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta yang paling menghebohkan skandal korupsi proyek pembangunan wisma atlet dan proyek Hambalang, merupakan sekelumit rentetan skandal politik yang melibatkan elite parpol. Kerena itu, tak heran jika kepercayaan publik pada institusi parpol kian tergerus.

Kedua, kegagalan parpol dalam menjalankan fungsi esensialnya mengakibatkan keterputusan antara “arena pemilu” dan “arena kerja politik” parpol di legislatif dan eksekutif. Relasi “intim” antara parpol dan konsituen hanya terjalin dalam siklus lima tahunan. Parpol benar-benar hadir di tengah-tengah rakyat hanya menjelang pemilu dalam konteks menjalankan fungsi rekrutmen politik. Fungsi itupun gagal dijalankan secara demokratis, transparan, dan berbasis meritokratis. Sementara pendidikan politik dan penjangkaran aspirasi melalui fungsi *interest aggregation* dan *interest articulation* merupakan fungsi parpol yang paling jarang ditunaikan secara serius. Karena itu, pantas jika parpol dinilai gagal menjalankan fungsinya oleh lebih dari 80 persen responden jajak pendapat *Kompas*, 19 Maret 2012.

Ketiga, rendahnya kinerja dan citra parlemen juga semakin menggerogoti citra kelembagaan parpol yang sejatinya sudah dipersepsikan buruk. Potret buram DPR periode sebelumnya – terjerat korupsi, tersandung berbagai skandal, dan rendahnya tingkat kehadiran – ternyata masih mendominasi wajah DPR periode 2009-2014. Alih-alih memperbaiki citra, wajah DPR yang 70 persen diisi pendatang baru ini, justru semakin memperburuk citra DPR. Karena itu, wajar mayoritas publik -- 94,3 persen responden – menilai DPR hanya menyuarakan kepentingan partai dan dirinya sendiri (*Kompas*, 9 April 2012).

Ketiga problem inilah menjadi penyebab memburuknya citra institusi parpol, serta kian meningkatnya jumlah pemilih mengambang (*swing voters*). Berdasarkan hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) misalnya, persentase pemilih mengambang naik signifikan, dari sebelumnya berkisar di angka 10-15 persen, kini lebih dari 20 persen, bahkan dalam survei CSIS mencapai 40 persen. Lalu, akan ke manakah arah para pemilih mengambang itu di Pemilu 2014 mendatang?

Ada empat kecenderungan pemilih mengambang. Pertama, memutuskan tak memilih atau menjadi *golput*, karena tidak ada partai alternatif yang dianggap kredibel dan memberi harapan baru. Kedua, memutuskan kembali memilih partai yang sama, karena pemilih menilai partai-partai secara umum hampir sama, sehingga problem sudah dianggap sebagai “zona normalisasi” partai-partai. Ketiga, memutuskan kembali ke partai asal, misalnya pemilih Golkar di 2004 yang berpindah ke Demokrat pada 2009 akan kembali ke Golkar karena Demokrat dianggap tidak lebih baik dari partai pilihan sebelumnya. Keempat, pemilih memutuskan berpindah ke “partai alternatif” yang lebih menjanjikan dan dinilai belum terkontaminasi

dengan problem penyimpangan dan citra buruk partai pada umumnya. Di ceruk pemilih inilah partai baru seperti Nasdem berpotensi mendapat limpahan dukungan suara.

Fenomena Nasdem

Kehadiran Partai Nasdem menjelang 2014 memiliki beberapa kemiripan dengan munculnya Partai Demokrat di 2004. Apalagi kehadiran Partai Nasdem yang sangat gencar beriklan dengan slogan “perubahan” di tengah terpuruknya citra partai-partai, berpotensi mengalihkan perhatian publik pada fenomena baru itu. Indikasi itu terlihat dari hasil survei terbaru LSI yang menempatkan Partai Nasdem di urutan keempat.

Ada empat kemiripan fenomena kehadiran Nasdem menjelang 2014 dengan Demokrat di 2004. Pertama, keduanya memiliki ikon politik cukup kuat. Jika Demokrat mengandalkan kekuatan figur harapan baru sebagai ikon politik, Nasdem lebih mengandalkan gagasan dan slogan “perubahan” sebagai andalan. Kedua, kehadiran kedua partai sama-sama mengandalkan strategi pencitraan iklan media (serangan udara) yang sangat massif. Apalagi Nasdem ditopang oleh dominasi jaringan media yang relatif kuat.

Ketiga, kedua partai ini hadir pada situasi dan momentum yang “tepat”, di mana eskalasi kekecewaan publik terhadap partai pemerintah cukup tinggi. Situasi akan berbeda jika Partai Nasdem muncul menjelang Pemilu 2009 saat dukungan terhadap partai pemerintah sedang di puncaknya. Keempat, keduanya pendatang baru – Nasdem di 2014 dan Demokrat di 2004 – belum “terkontaminasi” efek citra buruk partai. Kendatipun belum teruji, tetapi paling tidak secara citra relatif lebih “netral”.

Karena itu, jika tak ada “gempa politik” yang luar biasa dapat mengubah peta politik nasional, prospek peta kekuatan elektoral 2014 berpotensi mirip dengan “pola” konfigurasi Pemilu 2004. Di mana Golkar berpotensi menjadi pemenang pemilu karena stabilitas kekuatan elektoralnya di tengah penurunan dukungan terhadap partai pemerintah. Lalu muncul partai baru yang patut diperhitungkan seperti Demokrat di 2004, yaitu Partai Nasdem, serta kemungkinan partai menengah yang mengalami kenaikan seperti PKS di 2004, yaitu Partai Gerindra. Karena itu, stabilitas elektoral Golkar, potensi Gerindra dan Prabowo, serta kehadiran fenomenal Partai Nasdem patut diperhitungkan oleh peserta Pemilu 2014.

- Hanta Yuda AR -

Jika tak ada “gempa politik” yang luar biasa dapat mengubah peta politik nasional, prospek peta kekuatan elektoral 2014 berpotensi mirip dengan “pola” konfigurasi Pemilu 2004.

Asuransi TKI

Saat ini Komisi IX DPR RI tengah membahas RUU Perubahan atas Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN). Latar belakang direvisinya UU ini, salah faktornya adalah karena RUU ini lebih banyak mengatur soal penempatan daripada perlindungan, serta karena ada indikasi penyerahan tanggung jawab negara untuk melindungi warga negaranya kepada pihak swasta.

Pihak swasta yang sangat berperan dalam isu TKI terbagi dua, yaitu Perusahaan Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) dan Perusahaan Asuransi TKI. Untuk yang pertama cukup detil dibahas di UU PPTKILN. Sedangkan terkait asuransi, Pasal 68 UU PPTKILN mengamanatkan agar diterbitkan peraturan menteri yang secara khusus mengatur pelaksanaan asuransi bagi TKI.

Terkait hal ini, sudah ada Peraturan Menteri (Permen) Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 07/MEN/V/2010 tentang Asuransi TKI dan sudah direvisi melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Revisi hanya pada Pasal 13, 26 dan 41A, serta pada Lampiran No.1 terkait Nilai Pertanggungan.

Hal-hal yang diatur dalam Permen ini adalah tentang kriteria dan persyaratan perusahaan dan konsorsium asuransi, jenis-jenis program asuransi, kewajiban bagi PPTKIS untuk mengasuransikan calon TKI yang direkrut dan ditempatkan ke luar negeri, tata cara klaim, serta terkait perselisihan dan ketentuan sanksi. Namun, permasalahan asuransi masih ada, terutama terkait klaim asuransi menjadi momok bagi TKI yang mengalami masalah dan membutuhkan klaim asuransi.

Beberapa masalah terkait asuransi TKI

Sebagaimana diketahui, kepada setiap TKI dibebankan biaya sebesar Rp 400,000.- yang meliputi sebelum, saat, dan setelah penempatan. Namun, tetap saja ada masalah-masalah yang dialami TKI terkait asuransi.

Konsorsium asuransi TKI yang menyelenggarakan asuransi TKI, menjadi satu masalah tersendiri. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan pemeriksaan kinerja atas penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri pada tahun 2011, menemukan fakta bahwa kinerja 9 konsorsium asuransi TKI belum baik dan transparan.

Salah satu indikasi dari kinerja belum baik dan tidak transparannya konsorsium TKI adalah mekanisme penunjukan perusahaan asuransi TKI. Hal ini menyebabkan antarperusahaan asuransi tidak berlomba meningkatkan kinerja, tetapi malahan melakukan tawar-menawar dengan PPTKIS.

Konsorsium juga dinilai tak terbuka melaporkan produksi polis dan klaim. Masih menurut hasil pemeriksaan BPK, situs web konsorsium yang seharusnya dapat diakses, seringkali mengalami kendala teknis, data produksi, dan klaim TKI sulit diakses.

Kemudian, masalah yang sangat terasa bagi TKI adalah bahwa susahnyalah melakukan klaim asuransi dan bahkan sering juga tidak bisa diklaim. Temuan BPK ini terkonfirmasi dengan data dari LSM Peduli Buruh Migran (PBM) yang aktif mendampingi TKI yang bermasalah. Menurut catatan PBM selama Januari 2012 saja, ada 2.087 klaim yang diajukan. Dari data tersebut 813 (38,96%) klaim disetujui; 496 (23,77%) ditolak; 19 (0,91%) ditunda; dan 767 (36,75%) tidak diproses.

Permasalahan lainnya, selain PPTKIS melakukan negosiasi penurunan nilai premi dengan konsorsium asuransi, PPTKIS juga sering tidak mengikutsertakan TKI yang mereka rekrut pada beberapa komponen asuransi, jadi hanya sebagian. Misalnya, TKI tidak diasuransikan untuk komponen sebelum keberangkatan. Dengan demikian, ketika mereka gagal berangkat, yang seharusnya mereka bisa mengajukan klaim, mereka harus kehilangan haknya, karena PPTKIS yang merekrut mereka tidak mengasuransikan mereka di komponen ini.

Permasalahan berikutnya adalah TKI yang bekerja di luar negeri

tidak cukup paham akan persoalan asuransi TKI ini. Mereka tidak mengetahui bahwa asuransi TKI adalah bagian dari hak mereka dan diperparah lagi, karena polis asuransi mereka dipegang oleh PPTKIS. Dengan demikian, ketika akan melakukan klaim, mereka harus melewati berbagai tahap yang panjang dan proses yang sulit.

Masih dari sisi TKI, jumlah Rp 400,000.- yang harus mereka berikan untuk pembayaran premi asuransi dirasa semakin memberatkan, karena setiap TKI juga dipungut 15 dollar sebagai biaya pembinaan dan penyelesaian kasus-kasus TKI. Namun, proses “pengembalian” dana ini ke TKI tidak transparan dan sulit ditelusuri, karena dana ini dilihat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pernyataan Menakertrans, Muhaimin Iskandar, seperti dikutip Koran Tempo 28/6/2011).

Rekomendasi

Dari uraian di atas terlihat bahwa persoalan TKI sangat kompleks. Namun, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk melindungi TKI di luar negeri.

Terkait TKI yang tidak terlalu atau tidak tahu sama sekali tentang asuransi, perlu dipastikan bahwa pengetahuan tentang asuransi berikut penyelenggara, proses klaim, nilai tanggungan, resiko dan sebagainya, ada di dalam kurikulum pembekalan TKI sebelum diberangkatkan.

Dengan adanya tanggungan ganda bagi TKI yang akan ke luar negeri, maka sebaiknya pungutan 15 dollar setiap TKI untuk biaya pembinaan dihapuskan saja, karena tidak terasa secara langsung manfaatnya bagi TKI.

Terakhir, terkait pihak swasta yang bermain di urusan TKI, yaitu PPTKIS dan 9 perusahaan asuransi yang tergabung di dalam Konsorsium Asuransi TKI, perlu diawasi dengan seksama oleh komisi khusus pengawas.

Komisi tersebut terdiri dari perwakilan Kemenakertrans, Kemenlu, BNP2TKI, serta Kemenkeu. Kemenkeu perlu dilibatkan, karena Kemenakertrans hanya bertugas menunjuk perusahaan asuransi yang bisa masuk ke dalam konsorsium asuransi TKI. Sementara, untuk pengawasan masing-masing perusahaan asuransi tersebut masih berada di bawah wewenang Kemenkeu.

-Lola Amelia-

Asuransi bagi TKI adalah sebagai hak dan juga sebagai salah satu mekanisme perlindungan. Namun, penyelenggaraan asuransi TKI yang belum dikelola dengan baik dan transparan mengakibatkan asuransi belum memberi perlindungan yang komprehensif bagi TKI.

Ujian Nasional (Lagi)

Akhir Tahun Ajaran 2011/2012 sudah mendekat. Pendidikan formal akan kembali disibukkan dengan hiruk pikuk Ujian Nasional (UN). Rangkaian pelaksanaan UN bagi siswa tingkat SD, SMP, dan SMA di seluruh Indonesia ini praktis dilaksanakan April-Mei 2012. Namun hiruk pikuk persiapannya sudah dilakukan jauh-jauh hari, bahkan sejak awal tahun ajaran. Persiapan intensif untuk UN dilakukan baik oleh siswa, guru, sekolah, orangtua siswa, aparat negara di instansi pendidikan nasional, dan pihak-pihak yang terlibat lainnya, seperti penulis dan percetakan buku, lembaga bimbingan belajar, dan lainnya.

Walaupun kritik dan penolakan yang telah berlangsung sejak tahun-tahun silam, namun UN masih tetap dilaksanakan. UN dianggap tidak efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, malahan merugikan siswa. Banyak kalangan mendesak agar UN dihentikan.

Eksekusi UN

Seperti diketahui, tahun 2006 sejumlah orangtua, guru, dan pemerhati pendidikan menggugat pelaksanaan UN 2007. Ketika itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memenangkan gugatan masyarakat agar Pemerintah menghentikan pelaksanaan UN sebelum kondisi sarana prasarana di seluruh Indonesia ditingkatkan. Keputusan itu juga dikuatkan oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung. Namun Pemerintah, seperti diketahui pula, pada tahun 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012 ini tetap menyelenggarakan UN.

Pada 10 April 2012, Pemerintah diingatkan kembali oleh Tim Advokasi Korban UN (TekUN) agar melaksanakan putusan hukum untuk menghentikan UN selama kondisi pendidikan nasional diperbaiki. Namun, Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh menyatakan bahwa hal itu tidak relevan lagi, karena gugatan terhadap UN itu disampaikan pada 2006 untuk menggugat pelaksanaan UN 2007, yang mana situasi kondisinya sudah berbeda dengan

pelaksanaan UN pada tahun-tahun ini. Namun demikian, tidak dijelaskan lebih lanjut sejauh mana Pemerintah sudah memperbaiki sarana prasarana pendidikan di seluruh Indonesia sebagai syarat ketentuan untuk boleh dilaksanakannya UN di seluruh Indonesia.

Persiapan UN Tahun 2012

Pada UN 2012, kebijakan pelaksanaannya tidak ada perubahan dari ketentuan di tahun 2011. Ketentuan bobot untuk penentu kelulusan juga masih ditetapkan proporsinya 60:40, yaitu 60 persen hasil UN dan 40 persen hasil ujian sekolah dan nilai raport. Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional, Khairil Anwar, teknis pelaksanaan UN 2012 akan diperbaiki pada tingkat kesulitan soal, distribusi soal, dan pengamanannya. Permasalahan distribusi soal yang biasanya terjadi adalah pada ketepatan soal tidak tertukar, ketepatan waktu pengiriman soal, dan ketepatan dalam jumlah berkas soal ujian.

Sementara pendanaan untuk pelaksanaan UN 2012 yang dianggarkan oleh Pemerintah sebesar Rp 600 Milyar. Anggaran ini untuk membiayai pencetakan kertas soal dan lembar jawaban, biaya pengawas, biaya koreksi, dan lainnya. Anggaran ini sudah dibahas dan disetujui oleh Komisi X DPR RI.

Persiapan di kalangan siswa, guru, sekolah, orangtua, dan masyarakat mulai dari latihan-latihan soal yang sudah dilakukan di banyak sekolah bahkan sejak awal tahun ajaran ini. Persiapan latihan soal dan bimbingan belajar meningkat intensif sejak Desember-Januari, dan memuncak pada April-Mei, jelang dilaksanakannya UN. Indikasi yang sangat mencolok terlihat pada pasar buku pelajaran. Toko-toko buku dibanjiri oleh penjualan buku-buku persiapan UN, terutama latihan-latihan soal UN, baik tingkat SD, SMP maupun SMA, yang dijual dengan harga berkisar antara Rp 30 ribu hingga Rp 80 ribu. Bahkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara khusus menyiapkan dana sebesar Rp 13 Milyar untuk pengadaan buku bimbingan UN bagi siswa SMP dan SMA. Buku bimbingan UN ini yang berisi latihan soal-soal dan rangkuman kurikulum pelajaran itu dibagikan kepada siswa-siswa di tingkat akhir.

Tidak hanya itu, persiapan mental spritual pun dilakukan. Seperti di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, di mana ratusan siswa tingkat SMA menggelar doa bersama dan zikir untuk keberhasilan UN, yang dikoordinir oleh

persatuan guru agama setempat. Adapun di Majene pada beberapa tahun terakhir ini tercatat hasil UN terendah dari seluruh Kabupaten/ Kota di Sulawesi Barat, di mana pada tahun 2010 terdapat 955 dari 1.412 peserta UN yang tidak lulus UN.

Catatan jumlah peserta UN dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan bahwa peserta di tingkat SD masih lebih tinggi dari tingkatan SMP-SMA. Hal ini menunjukkan masih terjadinya angka partisipasi sekolah yang terjadi penurunan dari tingkat SD ke tingkat pendidikan lanjutan.

Data peserta UN tahun 2008-2011 perinciannya adalah seperti terlihat di Tabel berikut ini. Sementara, data untuk tahun 2012 hingga tulisan ini disusun, belum didapat angka rekapitulasi nasionalnya.

Tabel 1. Jumlah Peserta Ujian Nasional 2008-2011

Tingkat	UN 2008	UN 2009	UN 2010	UN 2011
SD/MI	4.599.217	4.514.024	4.428.797	4.249.367
SMP/MTs	2.260.147	3.575.987	3.605.163	3.716.596
SMA/SMK/ MA	3.567.472	2.207.805	2.448.071	2.442.599
Jumlah	10.426.836	10.297.816	10.482.031	10.408.562

Sumber: Kompas, Diknas, BSNP.

Tantangan perbaikan UN

Setiap tahunnya, selalu mengemuka tantangan pada perbaikan UN dan sistem pendidikan secara keseluruhan, atau penghentian praktik UN. Tantangannya antara lain adalah konsistensi tujuan UN untuk pemetaan kualitas, maka sebetulnya tidak perlu dengan ujian secara sensus, cukup hanya ujian secara sampling. Tantangan lainnya adalah konsistensi pada tujuan UN untuk peningkatan standar kualitas pendidikan, seharusnya yang ditingkatkan lebih dahulu adalah sarana dan prasarana pendidikan (sebagai input dan proses pendidikan) baru kemudian evaluasi hasil belajar lewat UN (sebagai output pendidikan).

Bila tantangan-tantangan itu tidak pernah terpenuhi, maka pelaksanaan UN setiap tahun hanya akan menjadi ajang hiruk pikuk latihan-latihan mengerjakan soal bagi siswa, dan ajang pengadaan barang bagi percetakan, penerbit buku, bimbingan belajar, sehingga UN hanya sekedar orientasi proyek.

-Antonius Wiwan Koban-

Bila tantangan perbaikan pada sarana prasarana pendidikan secara nasional tidak pernah terpenuhi, maka pelaksanaan UN setiap tahun hanya akan menjadi ajang hiruk pikuk latihan-latihan mengerjakan soal bagi siswa, dan ajang pengadaan barang bagi percetakan, penerbit buku, bimbingan belajar, sehingga UN hanya sekedar orientasi proyek.

Ujung Tombak Ketahanan Pangan

Cuaca ekstrim masih menjadi salah satu faktor utama yang menghambat ketahanan pangan nasional. Seperti ramai diberitakan, akibat cuaca ekstrim banyak daerah yang mengalami gagal panen (puso), lahan pertanian mengalami kekeringan atau nelayan yang tidak bisa melaut. Untuk itu, perlu diambil tindakan untuk bisa beradaptasi terhadap anomali cuaca, sehingga tidak mempengaruhi ketahanan pangan nasional.

Lebih jauh, membicarakan tindakan atau kebijakan-kebijakan terkait masalah ini juga tak lepas dari aktor-aktor yang terlibat. Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, secara jelas menyebutkan bahwa Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab mewujudkan ketahanan pangan.

Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kesediaan pangan. Sementara, masyarakat berperan dalam menyelenggarakan produksi, penyediaan, perdagangan, dan distribusi, serta sebagai konsumen. Dari segi pemerintah dan jika dikaitkan dengan kebijakan desentralisasi yang diadopsi Indonesia, maka ujung tombak kesuksesan ketahanan pangan tersebut ada di tingkatan Pemerintah Daerah.

Arti Penting Pemerintah Daerah dalam Ketahanan Pangan

Pemerintah Daerah menjadi aktor yang sangat strategis dan penting dalam hal implementasi dan pengawasan kebijakan terkait ketahanan pangan. Hal ini, secara detil diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, khususnya pada Bab IV. Pada bagian ini dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah harus memastikan aspek-aspek penting terkait ketahanan pangan berjalan baik.

Aspek-aspek penting itu adalah aspek ketersediaan pangan; distribusi pangan; cadangan pangan; diversifikasi pangan; pencegahan

kelangkaan pangan; pengendalian harga; meningkatkan peran masyarakat; dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pertanian.

Arti penting Pemerintah Daerah pada ketahanan pangan, lebih diperjelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Pasal 3 Ayat 2 PP tersebut menyatakan bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah. Konsekuensinya, Kepala Daerah wajib melaporkan situasi ketahanan pangan daerah sebagai bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Satu lagi kerangka perundang-undangan yang memuat bahwa urusan ketahanan pangan merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah adalah PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, terutama pada Bab II Pasal 7 Ayat 2.

Untuk mempertegas arti penting Ketahanan Pangan, dibentuklah satu kelembagaan tersendiri, yang disebut Dewan Ketahanan Pangan melalui PP RI No. 83 Tahun 2006. Sedangkan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pasal 22 Ayat 5 butir e, yang menyatakan bahwa bidang ketahanan pangan masuk perumpunan sendiri, diterjemahkan dengan mendirikan Badan atau Kantor Ketahanan Pangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota.

Arti Penting Pemerintah Daerah dalam Ketahanan Pangan

Berdasarkan paparan di atas, dapat dilihat bahwa sudah ada banyak peraturan perundang-undangan yang menekankan arti penting Pemerintah Daerah untuk ketahanan pangan, serta serangkaian program dan kelembagaannya. Namun, masih terdapat banyak fenomena yang mengindikasikan ketidaktahanan pangan di Indonesia. Dan ketika melihat aktor-aktor yang diatur dalam semua peraturan perundang-undangan tersebut, hanya ada dua pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat. Padahal masih ada kelompok lain yang juga strategis dilibatkan, yaitu pihak swasta. Oleh karena itu, rekomendasi atau langkah-langkah perbaikan harus ditujukan atau diambil oleh ketiga pihak ini.

Pemerintah, terutama pemerintah, dengan begitu banyak peraturan

perundangan lengkap dengan program dan kelembagaannya, maka yang diperlukan kemudian adalah *political will* untuk melaksanakan semua program tersebut. Beberapa catatan ketika Pemerintah Daerah hendak mengimplementasikan program-programnya adalah bahwa hendaknya ketika mereka memilih kelompok sasaran dan waktu pelaksanaan programnya, dilengkapi dengan *baseline* data yang akurat, sehingga tidak salah sasaran atau salah waktu, sehingga tidak berguna.

Catatan berikutnya adalah pelibatan semua komponen masyarakat yang diatur dalam sebuah mekanisme yang memungkinkan semua kelompok masyarakat, kaya miskin, serta perempuan dan laki-laki.

Masyarakat, hendaknya juga proaktif dalam setiap proses pembangunan dan salah satu caranya adalah dengan berorganisasi sesuai profesi mereka. Dalam organisasi tersebut, masyarakat dapat membicarakan permasalahan mereka, dan diparalelkan dengan peningkatan keterampilan mereka sesuai dengan profesi dan pengetahuan masing-masing.

Dengan demikian, ketika mereka akan kuat ketika mengajukan aspirasi mereka, karena dilakukan dengan terorganisir, berkelompok, dan relevan dengan pekerjaan yang mereka sehari-hari. Untuk tahap awal, diperlukan pendampingan bagi kelompok-kelompok ini, baik dari Pemerintah atau dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang sama fokus isunya.

Kemudian untuk pihak *swasta*, yang dalam konteks pangan di daerah biasanya adalah pihak perbankan, yang banyak berperan pada tahap distribusi atau pengolahan pangan. Pihak swasta perlu didorong untuk menjadikan petani sebagai mitra sejajar. Hal ini bisa dilakukan dengan pelibatan pihak swasta oleh Pemerintah dalam program-program, maupun pelibatan oleh masyarakat dalam kegiatan-kegiatan organisasi masyarakat tersebut.

Hal ini penting agar ketika pihak swasta berhubungan dengan petani, apakah lewat penyaluran kredit, biaya transportasi dan sebagainya, mereka memiliki pertimbangan-pertimbangan yang tak semata mencari untung sebesar-besarnya, tetapi juga pertimbangan keadilan bagi petani.

Pemerintah Daerah dalam konteks kebijakan desentralisasi yang dianut Indonesia, menjadi ujung tombak ketahanan pangan nasional. Hal ini dikuatkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan berikut kelembagaannya. Tujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan berhasil, hanya jika semua pihak dilibatkan, termasuk pihak swasta, yang tidak disinggung di kerangka kebijakan terkait ini.

-Lola Amelia-



THE NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis atas inisiatif Jeffrie Geovanie. Pada saat ini, Direktur Eksekutif dan Riset adalah Anies Baswedan dan Direktur Program adalah Adinda Tenriangke Muchtar.

TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan. **TII** bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, diskusi publik, *policy brief* dan analisis mingguan (*Weekly Analysis*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*) dan kajian tahunan (*Indonesia Report*).

Alamat kontak:

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194
Jakarta Pusat 10250 Indonesia
Tel. 021 390 5558 Fax. 021 3190 7814
www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG BISNIS & EKONOMI

Analisis bisnis

Dunia usaha membutuhkan analisis yang komprehensif dalam rangka meminimalisir risiko potensial, sehingga pada saat yang sama dapat meningkatkan nilai bisnisnya. Analisis bisnis merupakan solusi dalam perencanaan stratejik korporat untuk membuat keputusan yang dapat diandalkan. Divisi Riset Kebijakan Bisnis TII hadir untuk membantu para pemimpin perusahaan dengan memberikan berbagai rekomendasi praktis dalam proses pengambilan keputusan.

Riset di bidang bisnis yang dapat TII tawarkan antara lain: **(1) Analisis Keuangan Perusahaan**, yang meliputi analisis keuangan dan kajian risiko keuangan. **(2) Konsultasi Perencanaan Korporat** meliputi riset ekonomi dan industri, evaluasi kinerja, valuasi bisnis dan valuasi merk. **(3) Analisis Pemasaran Strategis** yang meliputi pemasaran strategis dan disain program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Riset bidang ekonomi

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi**, **(2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional**, **(3) Evaluasi Program**.

RISET BIDANG SOSIAL

Analisis sosial

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi

guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI & PELATIHAN BIDANG POLITIK

Survei Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-pilkada. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pilkada, yaitu (1) Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai *vote getter*; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

Pelatihan DPRD

Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

Telah Terbit

INDONESIA REPORT 2010

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) telah menerbitkan publikasi kajian INDONESIA 2010. Buku Indonesia 2010 ini merupakan salah satu edisi Indonesia Report yang dipublikasikan TII secara tahunan sejak 2005. Tim Penulis adalah peneliti The Indonesian Institute.

TOPIK-TOPIK YANG DIANGKAT DALAM INDONESIA 2010:

- Bagian 1. Kepresidenan Yudhoyono, Sekretariat Gabungan Koalisi, dan Pemerintahan Tersandera.
Penulis: **Hanta Yuda AR**
- Bagian 2. Penyesuaian Otonomi Khusus untuk Aceh dan Papua.
Penulis: **Aly Yusuf**
- Bagian 3. Mengurai Konflik Indonesia-Malaysia.
Penulis: **Benni Inayatullah**
- Bagian 4. Problem Penanganan Bencana Alam.
Penulis: **Endang Srihadi**
- Bagian 5. Peran Negara dalam Toleransi Beragama.
Penulis: **Antonius Wiwan Koban**

Tim Penulis adalah Peneliti The Indonesian Institute, dengan supervisi **Anies Baswedan**, Direktur Eksekutif & Riset, dan **Adinda Tenriangke Muchtar**, Direktur Program.

CARA PEMESANAN :

1. **Pembayaran ditransfer ke Rekening :**
Bank Mandiri Cabang Wisma Nusantara, Jakarta
No. Rek. 103 000 4444 838
Atas Nama: Yayasan Indonesia Untuk Semua
2. **Bukti transfer dikirim ke Sdri. Rahmanita** melalui
Fax. 021. 3190 7815 atau
E-mail: iethapoenya5678@yahoo.com
Tel. 021. 390 5558
3. **Konfirmasi pemesanan** mohon mencantumkan Nama Lengkap, Alamat Lengkap, dan Nomor telepon serta Alamat E-mail yang dapat dihubungi.

Jika Anda tertarik untuk membeli Indonesia Report dalam bentuk Paket (terdiri dari Indonesia Report 2005 s.d. 2010, silakan menghubungi kami di kontak tersebut di atas.



INDONESIA 2010 merupakan laporan tahunan *The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research* mengenai situasi ekonomi, sosial, dan politik Indonesia yang diterbitkan berkala setiap awal tahunnya. Pada terbitan awal tahun 2011 ini yang memuat laporan dan analisis situasi politik dan sosial Indonesia tahun 2010. Secara umum, seluruh tulisan menggambarkan situasi, evaluasi, dan rekomendasi kebijakan. Tidak lupa, tulisan-tulisan ini juga memberikan prediksi untuk tahun 2011.

Ada lima artikel dalam **Indonesia 2010** ini. Bidang politik, tulisan pertama adalah tentang Pemerintahan dan Koalisi Partai; tulisan kedua tentang Otonomi Khusus Aceh dan Papua. Di bidang hubungan internasional, topik yang diangkat adalah Konflik Indonesia-Malaysia. Sementara di bidang sosial, ada dua tulisan yaitu pertama tentang Penanganan Bencana Alam dan kedua tentang Toleransi Beragama.

Mengapa kami memilih topik-topik tersebut? Pemilihan topik-topik itu karena tingkat kepentingan isu-isu yang dibahas. Topik-topik tersebut menjadi rangkaian peristiwa menarik yang terjadi selama tahun 2010. Singkatnya, rangkaian peristiwa tersebut telah menarik perhatian masyarakat. Untuk itu, para pengambil kebijakan dapat menggunakan topik-topik tersebut sebagai catatan penting untuk tahun 2011.

Semoga **Indonesia 2010** dapat digunakan dengan maksimal oleh berbagai pihak, yaitu pengambil kebijakan, *private sector*, media massa, lembaga strategis, akademisi, mahasiswa, dan lainnya.

Anies Baswedan

*Direktur Eksekutif dan Riset
The Indonesian Institute*

Direktur Eksekutif & Riset

Anies Baswedan

Direktur Program

Adinda Tenriangke Muchtar

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Awan Wibowo Laksono Poesoro

Peneliti Bidang Politik

Benni Inayatullah

Hanta Yuda AR

Peneliti Bidang Sosial

Antonius Wiwan Koban,

Endang Srihadi, Lola Amelia.

Staf Program dan Pendukung

Edy Kuscahyanto, Hadi Joko S.,

Suci Mayang

Administrasi

Diana Paramita, Meilya Rahmi.

Sekretaris: Lily Fachry

Keuangan: Rahmanita

Staf IT: Usman Effendy

Desain dan Layout

Leonhard

Jl. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang, Jakarta 10250

Telepon (021) 390-5558 Faksimili (021) 3190-7814

www.theindonesianinstitute.com

e-mail: update@theindonesianinstitute.com

